

Nama :

Kelas :

No :

STUDI KASUS SENGKETA WILAYAH KEPULAUAN NATUNA

SEJARAH KAWASAN NATUNA

Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kekuasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Konflik Natuna Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontraversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi 1962-1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85 persen. Suku Jawa sekitar 6,34 persen dan etnis Tionghoa sekitar 2,52 persen. Baca juga: Kabupaten Natuna, Jalur Pelayaran Internasional Selepas Kofrontasi Indonesia-Malaysia, Sentimen Anti China di Kawasan Natuna Muncul. Dari 5.000-6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China.

Kemudian muncul slentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara Hukum Internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini.

KRONOLOGI KONFLIK NATUNA

Konflik Natuna saat ini Sengketa Laut China Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Dasar yang digunakan China untuk mengklaim seluruh Kawasan Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang meliputi sejumlah wilayah milik Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan dan Brunei Darussalam. Dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia dianggap menjadi penengah dan tidak pernah mengklaim wilayah itu.

Di beberapa kali kesempatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta setiap negara menghargai hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982. Akan tetapi, data pergerakan kapal menunjukkan, beberapa hari setelah rig semi-submersible Noble Clyde Boudreaux tiba di Blok Tuna di Laut Natuna untuk mengebor dua sumur appraisal pada 30 Juni, sebuah kapal Penjaga Pantai China berada di lokasi. Tak berapa lama, kapal Penjaga Pantai Indonesia juga ikut berada di sana.

Menanggapi pertanyaan dari Reuters, Kementerian Luar Negeri China mengatakan, kapal Penjaga Pantai China "melakukan kegiatan patroli normal di perairan di bawah yurisdiksi China." Kemlu China tidak menanggapi pertanyaan tentang komunikasi dengan Indonesia selama pengeboran, dan Kementerian Pertahanan China tidak menanggapi permintaan komentar.

Selama empat bulan setelahnya, kapal China dan Indonesia saling terlihat di sekitar ladang minyak dan gas, sering kali datang dalam jarak 1 mil laut satu sama lain, menurut analisis data identifikasi kapal dan citra satelit oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), proyek yang dijalankan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat.

Data menunjukkan sebuah kapal penelitian China, Haiyang Dizhi 10, tiba di daerah tersebut pada akhir Agustus dan menghabiskan sebagian besar dari tujuh minggu berikutnya dengan bergerak lambat dalam pola yang berdekatan dengan Blok D-Alpha. Blok D-Alpha adalah blok cadangan minyak dan gas yang juga berada di perairan yang diperebutkan, yang menurut studi Pemerintah Indonesia bernilai 500 miliar dollar AS (Rp

7,25 kuadriliun). Pada 25 September, kapal induk Amerika USS Ronald Reagan datang dalam jarak 7 mil laut dari rig pengeboran Blok Tuna. Sebanyak empat kapal perang China juga dikerahkan ke daerah itu, menurut IOJI dan nelayan setempat.

Ini merupakan sebuah dilemma bagi bangsa Indonesia menghadapi *the great power of Asia* yaitu China. Dimana banyak keuntungan yang dirasakan Indonesia terutama di bidang perdagangan dengan China. Ditakutkan dengan memanasnya konflik di Selat Natuna/ Laut China Selatan akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Namun dibalik itu Indonesia juga harus memiliki Kedaulatan penuh akan wilayahnya sendiri. Harus secara mati-matian menjaga setiap jengkal tanah air yang dimiliki.

JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI

1. Menurut kalian apakah Tindakan yang dilakukan oleh Negara Indonesia di dalam menjaga wilayah selat Natuna benar? Berikan alasannya secara jelas!
2. Menurut kalian apakah Tindakan Negara China melarang Negara Indonesia melakukan pengeboran Minyak Bumi di Kawasan Selat Natuna benar? Berikan alasannya secara jelas!
3. Seandainya kalian sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, hal-hal apa saja yang bisa tawarkan untuk melindungi Kawasan Natuna dari ancaman Luar Negeri? Saran yang diberikan minimal 5 dan jelaskan setiap tawaran yang kalian berikan!